

Jurnal Ilmu Sosial **Mamangoan**

Diamika Perempuan Pedagang Makanan Di Sicincin

Elsa melia Roza, Yulkardi & Rinel Fitlayeni

Motivasi & Strategi Keluarga Miskin Nagari Talu, Kab. Pasaman Barat Melanjutkan Pendidikan Anak Ke Perguruan Tinggi

Cici Rahma Sari, Elvawati & Dian Kurnia Anggreta

Dampak Sosial Ekonomi Objek Wisata *The Unique Park Waterboom* Di Kota Sawahlunto

Lisa Desatria, Fachrina & Faishal Yasin

Pandangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Terhadap Pelaksanaan Dana Bergulir PNPM-MP Di Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang

Elparianti, Ardi Abbas & Elvawati

Kehidupan Waria Di Jorong Mandiangin, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Susanki & Dian Anggraini Oktavia

Fungsi Koperasi Serba Usaha Ekonomi Desa (KSU-ED) Terhadap Masyarakat Nagari Tabek Talang Babungo, Kabupaten Solok

Yenti Welia, Witrianto & Refni Yulia



Jurnal Ilmu Sosial
Mamang'an

Nomor 2, Volume II
Tahun 2013

ISSN :
2301-8496

Program Studi Pendidikan Sosiologi,
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar



Mitra Bestari

Prof. Dr. Afrizal, MA. (FISIP, Unand Padang)
Dr. A. Latief Wiyata, M. Si. (Universitas Jember, Jember)
Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Dr. Fikarwin Zuska, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Nurus Shalihin, M. Si., Ph.D. (Fak. Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si. (FISIP, UI Jakarta)
Dr. Wahyu Wibowo, M. Si. (Universitas Nasional, Jakarta)

Dewan Redaksi

Dr. Zusmelia, M. Si.
Dr. Maihasni, M. Si.
Adiyalmon, S. Ag., M. Pd.
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Pemimpin Redaksi

Firdaus, S. Sos., M. Si.

Anggota Redaksi

Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.
Rinel Fitlayeni, S. Sos., MA.
Surya Prahara, SH.
ISSN: 2301-8496

Alamat Redaksi:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang
Jl. Gunung Pangilun, Padang
Email: redaksimamangan@yahoo.com

Penerbit :

Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang

Contac person :

Firdaus (Hp. 085263881221/Email : daus_gila@yahoo.com)

DAFTAR ISI

Diamika Perempuan Pedagang Makanan Di Sicincin <i>Elsa melia Roza, Yulkardi & Rinel Fitlayeni</i>	60-73
Motivasi & Strategi Keluarga Miskin Nagari Talu, Kab. Pasaman Barat Melanjutkan Pendidikan Anak Ke Perguruan Tinggi <i>Cici Rahma Sari, Elvawati & Dian Kurnia Anggreta</i>	74-81
Dampak Sosial Ekonomi Objek Wisata <i>The Unique Park Waterboom</i> Di Kota Sawahlunto <i>Lisa Desatria, Fachrina & Faishal Yasin</i>	82-91
Pandangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Terhadap Pelaksanaan Dana Bergulir PNPM-MP Di Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang <i>Elparianti, Ardi Abbas & Elvawati</i>	92-100
Kehidupan Waria Di Jorong Mandiangin, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat <i>Susanki & Dian Anggraini Oktavia</i>	101-107
Fungsi Koperasi Serba Usaha Ekonomi Desa (KSU-ED) Terhadap Masyarakat Nagari Tabek Talang Babungo, Kabupaten Solok <i>Yenti Welia, Witrianto & Refni Yulia</i>	108-105

PANDANGAN RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) TERHADAP PELAKSANAAN DANA BERGULIR PNPM-MP DI KELURAHAN BALAI GADANG, KOTA PADANG

Elparianti¹, Ardi Abbas², Elvawati³

^{1&3} Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat

² Universitas Andalas

ABSTRACT

This article background is information about the data differences between statistically and realities in society about PNPM-MP Programme. Statistically PNPM-MP is considered good enough in the effort to reduce poverty have been able to reduce the number of target households in the Balai Gadang, but the reality in the field are still many poor people. In general view of the target households are not re-categorized as the objectives of the program provides pastures that show received a position as a party that can not accept a revolving fund, As for the efforts made by the PNPM-MP after the target households are not back to being targeted by inviting households to be targeted to training events associated with increased economic cooperation with the family and other financial institutions greater. As for the view of the target households on the implementation of the revolving fund PNPM-MP in the fight against poverty can be concluded that in general the target households provide a positive outlook for feel that the borrowing of funds on a rolling basis from PNPM-MP, especially for households sesaran the installment lending smoothly and has had previous attempts

Keywords : *Household Goals, PNPM-MP Revolving Fund, Poverty*

ABSTRAK

Artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan informasi antara data secara statistik dengan realitas yang ada dalam masyarakat. secara statistik pelaksanaan PNPM-MP dinilai cukup baik dalam upaya menanggulangi kemiskinan telah mampu menurunkan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Kelurahan Balai Gadang, namun realitasnya dilapangan masih banyak masyarakat misikin. Secara umum pandangan rumah tangga sasaran (RTS) tidak kembali terkategori sebagai sasaran pelaksanaan program yaitu RTS memberikan pandangan yang menunjukkan menerima posisi sebagai pihak yang sudah tidak bisa menerima dana bergulir, adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksanaan PNPM-MP setelah RTS tidak kembali menjadi sasaran dengan mengundang RTS ke acara pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi keluarga dan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain yang lebih besar. Sedangkan untuk pandangan RTS terhadap pelaksanaan dana bergulir PNPM-MP dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat disimpulkan bahwa secara umum RTS memberikan pandangan positif karena merasa terbantu dengan adanya peminjaman dana secara bergulir dari PNPM-MP terutama bagi RTS yang angsuran peminjamannya lancar dan telah memiliki usaha sebelumnya.

Kata Kunci: *Rumah Tangga Sasaran, Dana Bergulir PNPM-MP, Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan sangat membutuhkan perhatian semua pihak secara bersama dan terkoordinasi dengan baik dalam rangka penanggulangannya, penanganan selami ini cenderung dilaksanakan secara parsial dan tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena banyak pihak bagi masyarakat dalam hal pemberdayaan dan pemecahan dalam permasalahan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan tersebut pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dikenal dengan PNPM Mandiri pada tahun 2007, melalui PNPM Mandiri ini dirumuskan kembali penanggulangan kemiskinan secara sistematis seperti yang diharapkan. Masyarakat ditempatkan bukan sebagai objek dari penanggulangan kemiskinan tersebut. Masyarakat mulai dilibatkan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantuan dan evaluasi (Kementerian Pekerjaan Umum, 2007).

Pelaksanaan PNPM Mandiri pada tahun 2007 dimulai dengan program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat diperdesaan yang sekarang dinamakan PNPM Mandiri Perdesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar pengembangan masyarakat di perkotaan yang sekarang dinamakan PNPM Mandiri Perkotaan.

Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi pengembangan modal sosial masyarakat, sehingga dimasa yang akan datang masyarakat dapat menyiapkan secara efektif program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat (Kementerian Pekerjaan Umum, 2010).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dengan cakupan wilayah dampingan 10 Kabupaten dan Kota, 23 Kecamatan, 204 Kelurahan. Pelaksanaan ini dimulai pada tahun 2008, dalam pelaksanaannya akan berakhir pada

tahun 2014 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 441.799 jiwa yang tersebar keseluruhan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sasaran pelaksanaan PNPM MP sejak tahun 2008. Berdasarkan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 penduduk miskin Kota Padang adalah 33.505 KK atau 170.812 Jiwa. (BPS, 2011) Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah KK
1	Padang Barat	1.991
2	Padang Timur	2.949
3	Padang Utara	1.475
4	Padang Selatan	3.038
5	Koto Tengah	6.935
6	Nanggalo	1.689
7	Kuranji	5.190
8	Pauh	2.568
9	Lubuk Kilangan	1.462
10	Lubuk Begalung	4.017
11	Bungus Teluk Kabung	2.191
Jumlah		33.505

Sumber: Padang Dalam Angka 2011

Berdasarkan tabel diatas terlihat Kecamatan Koto Tengah merupakan Kecamatan yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan 10 Kecamatan lainnya. Kecamatan Koto Tengah memiliki 13 Kelurahan dan jumlah rumah tangga sasaran, berikut data PPLS pada tahun 2011.

Tabel 2
Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kecamatan Koto Tengah

No	Kelurahan	Jumlah KK
1	Aia Pacah	548
2	Balai Gadang	1.055
3	Batang Kabung	244
4	Batipuh Panjang	900
5	Bungo Pasang	337
6	Dadok Tunggul Hitam	392
7	Koto Panjang Ikua Koto	392
8	Koto Pulai	151
9	Lubuak Buayo	277
10	Lubuk Minturun	691

11	Padang Sarai	731
12	Parupuak Tabing	675
13	Pasia Nan Tigo	346
Jumlah		6.935

Sumber: Litbang Kota Padang 2011

Berdasarkan data diatas terlihat Kelurahan Balai Gadang merupakan kelurahan yang memiliki angka tinggi kemiskinan di Kecamatan Koto Tangah. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh pihak kelurahan dengan berbagai program kerakyatan termasuk PNPM MP yang juga diprogramkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu bagaimana rumah tangga sasaran terhadap pelaksanaan dana bergulir PNPM MP dalam upaya penanggulangan kemiskinan?

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam paradigma defenisi sosial manusia dipandang sebagai individu yang berfikir dan kreatif sehingga proses berfikir dan interpretasi individu terhadap sesuatu merupakan hal yang diteliti dalam prespektif ini. Interaksionisme simbolik adalah manusia saling menterjemahkan dan saling mendefenisikan tindakannya. Memandang bahwa tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tapi didasarkan atas "makna" yang diberikan terhadap tindakan orang lain (Ritzer & Goodman, 2010)

Ada tiga terminologi kunci dari teori interaksionisme simbolik dalam memahami kehidupan sosial menurut Blumer (Poloma, 2010) *Pertama*, individu bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, *Kedua*, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, *Ketiga*, makna-makna tersebut disempurnakan melalui proses sosial yang terjadi.

Dalam penelitian (Sukron, 2009) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan melalui PNPM Mandiri, menyebutkan Proqram PNPM Mandiri telah diimplementasikan dengan mengacu pada konsep pemberdayaan parsipatoris, dimana masyarakat telah terlibat secara aktif dalam mengawal pelaksanaan program dimulai dari sosialisasi, refleksi, pemetaan dan pelaksanaan. Dalam usaha yang dilakukan

untuk meningkatkan kesekahteraan masyarakat miskin malalui pengembangan usaha pinjaman dana bergulir bagi masyarakat. Dari pertumbuhan tingkat kemiskinan menunjukan angka yang positif, artinya terdapat penurunan angka kemiskinan selama 2 tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar 0,18% dari usaha yang dilakukan.

Penelitian (Yulyanti, 2010) melihat implementasi program PNPM Mandiri belum maksimal ini dikarenakan baru mencapai angka 64,26% dari angka maksimal yang diharapkan 75%. Ketidakmaksimalan tersebut disebabkan bebapa faktor yaitu: Pertama, lambatnya pencairan dana pendampingan sehingga menghambat jalannya program dan mengakibatkan tumpang tindih pelaksanaan program pada periode berikutnya. Kedua, kepatuhan SDM terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PNPM Madiri kurang, terlihat dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kasus penyelewengan peran dari masing-masing jabatan yang seharusnya hanya sebagai pembina, tetapi turut campur tangan dalam pengelolaan dana dan penentuan *suplayer*. Ketiga, tingkat kualitas SDM di Kecamatan Cadasari yang belum merata disetiap desa yang ikut melaksanakan PNPM Mandiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangan. Pemilihan informan menggunakan *purposive* (sengaja), metode pengumpulan data yaitu obsevasi non partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisi data digunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman

PANDANGAN RTS TERHADAP PELAKSANAAN DANA BERGULIR PNPM-MP

Sebelum PNPM-MP ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Balai Gadang diantaranya, Raskin (beras untuk rakyat miskin), Subsidi BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Askeskin, Kredit Mikro Nagari, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Serta untuk lebih

mengintensifkan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, maka pada tahun 2009 PNPM-MP mulai dilaksanakan di Kelurahan Balai Gadang.

Proses awal pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Balai Gadang diawali dengan musyawarah sosialisasi ditingkat kelurahan yang dihadiri oleh pihak kelurahan, ketua RT/RW setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat, musyawarah dilakukan dikantor lurah Balai Gadang. Pada musyawarah sosialisasi ini fasilitator menjelaskan mengenai pelaksanaan program yang didampingi oleh penanggung jawab (PJOK), yang meliputi beberapa tahapan yaitu: penyebaran informasi, mempersiapkan masyarakat, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan lembaga keswadayaan masyarakat, penyusunan pranngkis, dan pengorganisasian kelompok swadaya masyarakat.

Tahap pelaksanaan tersebut dilakukan pada tahun 2009, selanjutnya dasar kegiatan yang telah dirancang melalui PNPM-MP terletak pada kelompok-kelompok masyarakat. proses kegiatan semuanya berlangsung dalam masyarakat yang didampingi oleh para pendamping dan fasilitator kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pemamfaatan bantuan PNPM-MP salah satunya dapat dipergunakan sebagai dana bergulir dengan melakukan aktifitas usaha ekonomi produktif. Usaha-usaha kecil yang berorientasi pada berbagai sektor perdagangan, kerajinan, industri, peternakan dan jasa yang dapat dilakukan oleh penerima.

Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan PNPM-MP dikategorikan sebagai berikut: 1) kegiatan pendidikan masyarakat, 2) kegiatan kesehatan masyarakat, 3) kegiatan simpan pinjam untuk perempuan, 4) kegiatan sarana prasarana, 5) peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi.

Pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Balai Gadang meliputi tiga aspek yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Dari ketiga aspek tersebut yang berimplikasi terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah aspek ekonomi berupa simpan pinjam dana secara bergulir, ini dikarenakan sasaran langsung kepada KK miskin.

Pelaksanaan simpan pinjam dana bergulir bertujuan untuk menyediakan akses

layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan peminjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pedapatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Disamping itu juga bertujuan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Syarat-syarat masyarakat untuk mendapatkan peminjaman adalah rumah tangga miskin yang terdata dalam pemetaan RTS, Minimal 30% peminjam perempuan, telah menjadi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan akses pinjaman bagi KSM yang kinerja pengembalian baik terjamin keberlanjutannya.

Realisasi pemberian bantuan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut meliputi enam tahap kegiatan yaitu: 1) pengajuan pinjaman, 2) pemeriksaan peminjaman, 3) putusan pinjaman, 4) realisasi pinjaman, 5) pembinaan pinjaman, 6) pembayaran pinjaman. Seluruh kegiatan dilaksanakan oleh fasilitator dan relawan masyarakat yang saling bekerjasama untuk merealisasikan dana bergulir dimasyarakat.

Di tingkat masyarakat proses penyaluran dana pencairan dana BLM dilaksanakan berdasarkan kelompok bukan perorangan (individu) yang meliputi tahapan sebagai berikut: memiliki usaha dan akan memulai usaha baru, pembentukan kelompok KSM, pembuatan proposal yang sesuai dengan anggota KSM, menyerahkan fotocopy KK, KTP, photo serta mengisi blangko yang telah disediakan oleh KLM, LKM kemudian akan menyeleksi kelayakan anggota KSM.

Kegiatan peminjaman ini sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari bentuk pengembalian peminjaman dari anggota KSM mencapai 95%. Angka ini menunjukkan keseriusan KSM dalam memanfaatkan dana bergulir dari program PNPM-MP.

Pelaksanaan PNPM-MP dalam upaya menanggulangi kemiskinan sangat erat kaitannya dengan masyarakat yang dijadikan sebagai sasaran maupun yang sudah tidak menjadi sasaran dalam pelaksanaan program, keterkaitan tersebut salah satunya dapat dilihat dari pandangan atau persepsi yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Pandangan yang diberikan oleh RTS terhadap pelaksanaan PNPM-MP dalam upaya penanggulangan kemiskinan terutama dari aspek ekonomi berbeda-beda baik antara RTS yang memang merasakan manfaat dari pelaksanaan program secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu penyajian dari pandangan yang diberikan RTS tersebut diklasifikasikan berdasarkan RTS yang memberikan pandangan yang merespon positif pelaksanaan program PNPM-MP dikategorikan sebagai berikut:

KATEGORI RESPON POSITIF RTS.

Banyak masyarakat yang merespon program yang dilaksanakan oleh PNPM-MP dalam bidang peminjaman dana bergulir bagi RTS dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dari proses peminjaman ini terlihat tidak mempersulit RTS dalam mendapatkan pinjaman dana, KSM hanya melakukan administrasi dan membayar Rp15.000. biaya ini merupakan jasa peminjaman yang dikenakan pada penerima bantuan sebesar 1,5% dari total peminjaman tiap bulannya.

Dana peminjaman awal melalui kelompok KSM sebesar Rp. 1.000.000 dengan angsuran sebesar 115.000/bulannya dalam jangka waktu 10 bulan. Besarnya peminjaman yang diberikan ini disesuaikan dengan bentuk usaha dan kemampuan membayar. Dalam peminjaman berikutnya kelompok diberi batas maksimal untuk meminjam Rp. 2.000.000. bentuk pengembangan usaha RTS seperti warung nasi goreng, berjualan Jus buah, *sandwich* gerobak dan membuka warung makanan .

Dalam peminjaman yang dilakukan RTS yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bentuk pembayaran cicilan yang dilakukan RTS model sistem renteng yaitu kelancaran pembayaran satu anggota berpengaruh terhadap anggota lainnya.

Selain peminjaman untuk pengembangan usaha, bentuk peminjaman lainnya seperti kebutuhan pokok untuk KSM juga bisa dilakukan oleh RTS. Hal tersebut menunjukkan rendahnya pengawasan dan pemantauan dari pihak pelaksana program dilapangan. Pelaksanaan dilapangan pengelola program juga tidak pernah melihat situasi atau keadaan dilapangan. Pandangan positif terhadap program PNPM-MP yaitu

juga memberikan kemudahan dalam peminjaman dana bergulir, dan terlalu memberikan kemudahan ternyata banyak juga masyarakat yang tidak tergolong kelas rumah tangga miskin juga bisa mendapatkan pinjaman ini dipaparkan oleh masyarakat yang menerima dana pinjaman dari program tersebut.

Pinjaman dana bergulir yang dilaksanakan pada masyarakat banyak memberi manfaat bagi masyarakat miskin pada aspek ekonomi, yang dianggap mampu memberikan peluang dalam pengembangan usaha dan kebutuhan pokok keluarga. Terkait dengan masalah kemiskinan yang berhubungan dengan dimensi kemiskinan secara struktural ini salah satunya tampak dari kurang percayanya pihak pelaksana program terhadap RTS terutama bagi yang berpendapatan rendah untuk dipinjami dana karena memandang kurangnya kesanggupan RTS dalam mengembalikan pinjaman yang membuat pelaksana program lebih bersifat selektif dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan, dengan kata lain masih adanya dominasi elit dalam peminjaman dana bergulir PNPM-MP di Kelurahan Balai Gadang yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam pengembangan masyarakat miskin. Penegasan mengenai hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang memeberikan respon yang negatif pada pelaksanaan PNPM-MP.

KATEGORI RESPON NEGATIF RTS.

Dalam pelaksanaan program PNPM-MP dana bergulir buat menanggulangi kemiskinan ternyata masih banyak keluarga miskin yang tidak merasakan manfaatnya dari pelaksanaan program tersebut, ini terlihat dari kurang terpetakan KK miskin yang lakukan fasilitator, banyak dari RTS yang belum dapat dana pinjaman. Dari sinilah RTS merasa tidak ada memberikan atau menaiki taraf kehidupan keluarga miskin. Selain itu juga masyarakat memberikan pandangannya pada pelaksanaan program dengan pandangan negatif, dikarenakan RTS yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diputuskan peminjamannya. Banyaknya dari RTS yang tidak membayar cicilan dari kesepakatan yang sudah diberikan kepada RTS. RTS seperti ini memberikan respon yang kurang baik

kepada pelaksanaan program PNPM-MP, dari semua RTS yang memberikan pandangan nya kurang bermanfaat bagi keluarga miskin, disebabkan tidak sanggup RTS dalam pengelolah uang yang dipinjamkan.

Kebanyakan RTS yang mendapatkan dana bergulir tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dana yang didapatkan, dikarenakan RTS tidak bisa mengelola uang, seperti salah satu RTS mendapatkan pinjaman Rp.1.000.000 dan mencoba membuka warung dan hasilnya tidak memberikan keuntungan bagi RTS yang berakhir ketidaksanggupan RTS dalam membayar cicilan perbulan dari kesepakatan yang dilakukan.

Bentuk seperti ini yang mengakibatkan RTS terjebak dengan pinjaman dana bergulir, sekitar 40% di Kelurahan Balai Gadang terkendala dengan cicilan perbulan, selain itu juga faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk merubah nasibnya karena struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat Kelurahan Balai Gadang.

Permasalah seperti ini tidak selalu datang dari satu pihak saja, karena apa yang dilakukan oleh pihak pelaksana PNPM-MP nampaknya bukan tidak beralasan, hal ini dilakukan untuk membentuk kesadaran masyarakat bahwa pinjaman yang diberikan bukan sebuah pinjaman cuma-cuma sehingga sering terjadi pemutusan dalam peminjaman apabila terjadi penunggakan, hanya saja pelaksanaannya yang belum tepat karena masih ada masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan pinjaman justru mereka yang lebih menikmati pelasaan pinjaman dana bergulir dari PNPM-MP serta pelaksanaannya belum sesuai dengan fungsi pemberdaannya belum dilaksanakan.

Selain itu juga terjadi karena pihak pengurus semata-mata hanya ingin menjaga keberlangsungan PNPM-MP di kelurahan mereka dalam aturannya memang ada saksi bagi kelurahan maupun kelompok penerima bantuan jika terjadi penyimpangan dan penunggakan cicilan, dimana untuk periode selanjutnya aspirasi para anggota kelompok yang lain tidak akan diakomodir lagi pada tahap selanjutnya. Satu anggota saja yang tidak membayar maka anggota kelompok yang lain juga akan terkena imbasnya, pelaksana PNPM-MP

menyebutnya dengan *sistem tanggung renteng*.

Pengurus Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sangat berhati-hati dalam memilih orang atau kelompok yang akan dipinjami dana, karena konsekuensinya bagi pihak pengurus harus bersedia menanggulangnya dan harus selalu bersedia melakukan penagihan kepada RTS. Namun walaupun demikian tetap saja para pengurus hendaknya lebih mengutamakan pemberian bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan upaya pemberdayaan harus benar-benar intensif dilaksanakan.

Apabila dilihat dari masyarakatnya maka masalah kemiskinan di Kelurahan Balai Gadang juga datang dari RTS itu sendiri yang masih memaknai pinjaman yang diberikan bukan sebagai dana stimulus untuk merangsang kreatifitas mereka dalam meningkatkan kesejahteraannya, melinkan masyarakat masih terjebak dalam paradigma yang memaknai pinjaman lebih kepada bentuk "pemberian" dari pemerintah, sehingga merasa berat dalam pengembalian pinjaman yang diberikan.

Paradigma bentuk "pemberian" ini menjadikan RTS malas, pasrah pada keadaan yang ada dan sudah memotivasi diri untuk mau lepas dari kemiskinan, hal ini memiliki korelasi dengan apa yang disebut budaya kemiskinan menurut Lewis (Suparlan, 1984) dimana budaya kemiskinan mencakup pada apa yang diyakini (nilai-nilai), respon dalam tindakan (sikap) dan abstraksi-abstraksi dari kelakuan sehingga terbentuk sikap ketergantungan, kuatnya perasaan tidak berharga dan memiliki sikap rendah diri. Selain ditandai dengan sikap yang memaknai pinjaman lebih kepada bentuk "pemberian" bukan kepada stimulus maka juga terdapat perilaku RTS yang memanfaatkan pinjaman untuk kepentingan lain yang menyebabkan sulitnya RTS untuk bisa berkembang dan terlepas dari kemiskinan.

PANDANGAN RTS TIDAK TIDAK KEMBALI TERKATEGORI SEBAGAI SASARAN

Banyak dari RTS yang tidak masuk dalam kategori untuk peminjaman dana bergulir kembali, padahal mereka mengikuti semua langkah-langkah dalam proses peminjaman hingga semua pembayaran cicilan dibayar tepat waktu. Dalam

pelaksanaan program PNPM-MP bagi masyarakat yang sudah lebih dua kali dapat pinjaman dana sudah tidak didapatkan lagi untuk meminjam. Dari klarifikasi berdasarkan RTS yang memberikan pandangan yang merespon positif mengenai tidak kembali terkategori sasaran dan sebaliknya.

1. Kategori pandangan positif tidak kembali terkategori

Pandangan RTS yang merespon positif mengenai tidak kembali terkategori sebagai sasaran tidak menjadi masalah bagi RTS, dikarenakan RTS sudah merasa usaha yang dikembangkan dari peminjaman dana bergulir bisa dibidang cukup berkembang seperti RTS yang membuka usaha sewa pelaminan, usaha ini sudah cukup berkembang dari modal tiga kali peminjaman, bagi RTS yang sudah memiliki usaha dan cukup berkembang menerima positif dari aturan yang diberlakukan pelaksana program yaitu PNPM-MP.

RTS tersebut menyatakan sudah aturan yang disepakati untuk aturan peminjaman hanya berlaku tiga kali peminjaman. Aturan seperti ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi RTS untuk membuka peluang usaha dan juga untuk melepas ikatan kemiskinan pada keluarga miskin di Kelurahan Balai Gadang.

RTS yang mendapatkan pinjaman selama tiga kali peminjaman ini merupakan RTS yang rajin mencicil tepat waktu tidak pernah mengalami tunggakan dalam cicilan, dari keuntungan usaha milik RTS ini bisa untuk biaya pendidikan anak, kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan pangan, sandang dan primer.

Pelaksanaan program PNPM-MP ini sudah terealisasi dengan baik, namun hal seperti ini belum bisa melepaskan keluarga miskin untuk keluarga dari kemiskinan yang dirasakan masyarakat di Kelurahan Balai Gadang, dari realisasi program ini masih banyak keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan, walaupun secara operasional sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan program namun masih bersifat formalitas, karena belum

mementingkan kepentingan keluarga miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan, melainkan baru memberikan modal agar dana pinjaman PNPM-MP bisa digulirkan, sehingga penerima bantuan lebih kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan untuk mengembalikan.

2. Kategori Pandangan Negatif Tidak Kembali Terkategori

Pandangan RTS yang merespon negatif mengenai tidak kembali terkategori sebagai sasaran menjadi suatu permasalahan yang dirasakan RTS. Kebanyak RTS mengeluh dikarenakan tidak bisa mendapatkan pinjaman lagi dari pelaksana program. RTS ini diberikan sanksi oleh pelaksana program dikarenakan pinjaman yang diberikan tidak memperlihatkan kemajuan usahanya, secara tidak langsung RTS tidak sanggup mencicil dari yang sudah ditetapkan diawal peminjaman.

Kendala dalam mengelola usaha RTS menjadikan RTS masuk kedalam tidak mendapatkan peminjaman kembali. Usaha yang dikembangkan RTS banyak yang gulung tikar atau tidak menunjukkan keuntungan dan berakhir penutupan pada usaha tersebut, penutupan usaha ini yang menjadikan susahnya RTS untuk mencicil tunggaknya dari yang disepakati diawal peminjaman.

Seperti usaha berjualan lontong, membuka warung, berjualan pulsa, menjual gorengan, selain usaha yang dikembangkan oleh RTS, ilmu dalam pengelolaan usaha tersebut juga salah satu faktor usaha RTS tidak bertahan lama, ketidaktahuan RTS dalam mengelola uang menjadi penyebab utama terhentinya usaha RTS.

Pelaksanaan program menghentikan pinjaman dana bergulir diakibatkan keluarga miskin yang meminjam tidak sesuai lagi dari kesepakatan awal yaitu banyaknya tunggakan cicilan dari RTS yang meminjam. Dari kebanyakan RTS yang tidak kembali terkategori ini banyak cenderung pasrah pada keadaan, dan rendahnya untuk melawan kemiskinan yang dirasakannya ini menunjukan indikasi adanya kebudayaan

kemiskinan yang melekat pada keluarga miskin.

Pelaksana program juga belum mampu membentuk kesadaran masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan, ini ditunjukkan pada rendahnya motivasi RTS untuk memaksimalkan bantuan yang berikan berupa pinjaman dana bergulir tanpa dibekali keterampilan untuk mengelolanya. Sedangkan dalam petunjuk teknis operasional pinjaman dana bergulir dijelaskan, bahwa pengelola pinjaman bergulir harus berorientasi pada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan produktif lainnya.

Selain tidak kembali terkategori dalam pelaksanaan program, sebagian RTS juga yang tidak melihat usahanya untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir, dikarenakan pinjaman akan menjadikan RTS terlilit utang, sehingga RTS yang berpikiran seperti ini tidak akan melanjutkan untuk meminjam dana bergulir tersebut. Namun agak sedikit berbeda dari RTS yang meminjam dan mencicil dengan tepat waktu akan mengharapkan pinjaman berikut dari ketentuan peminjaman yaitu tiga kali, tidak diberikan pinjaman kepada RTS tersebut yang pada akhirnya RTS hanya pasrah melihat ketidakadilan bagi RTS yang mengalami tidak mendapatkan peminjam. Banyak memberikan pandangan adanya ketidakadilan dalam peminjaman yang dirasakan RTS, dikarenakan tidak mendapatkan peminjaman kembali.

Berdasarkan pendekatan teori intraskionisme simbolik, bahwa pemaknaan tersebut berdasarkan dari interaksi sosial yang diantarai dengan penggunaan simbol-simbol yang ditampilkan dan tindakan yang dilakukan pihak pelaksana program PNPM-MP dalam upaya penanggulangan kemiskinan sehingga terbentuk pemaknaan tindakan oleh RTS. Adapun simbol yang melekat pada PNPM-MP terlihat dari simbol yang dikonsumsi secara verbal melalui penggunaan bahasa, dalam penelitian ini terlihat dari

bagaimana PNPM-MP (LKM, Faskel dan UPK) dalam mengkomunikasikan programnya secara verbal yaitu pengalokasian dana dan penentuan RTS lebih ditentukan atas dasar kemampuan membayar oleh RTS selain itu juga didasarkan pada kedekatan dengan pihak pelaksana PNPM-MP walaupun kedekatan ini tidak termasuk kedalam hal yang dikomunikasikan secara verbal namun terlihat dari sikap yang ditampilkan, inilah yang akhirnya dimaknai oleh keluarga RTS yang dalam penelitian ini dikategorikan pada pandangan yang memaknai baik, sedang dan kurang baik.

Salah satu kasus tersebut dari keluarga RTS yang bekerja sebagai pemulung yang benar memanfaatkan pinjaman dana bergulir untuk usaha, usaha yang dibuka adalah berjualan makanan ringan, namun usaha tidak menguntungkan dikarenakan sepi pembeli, sehingga jumlah pemasukan dan keuntungan yang didapatkan sulit untuk ditentukan, karena setiap tidak setiap hari ada pemasukan dari usahanya. Sementara itu mereka harus membayar cicilan sebesar Rp. 115.000/bulan, sedangkan keuntungan perhari yang ia dapatkan tidak bisa digunakan untuk membayar cicilan, karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan berujung pada pemutusan peminjaman inilah yang menjadikan masalah dalam pelaksanaan program PNPM-MP.

Selaknya sebuah program pemberdayaan dari awal penyaluran dana seharusnya sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aktifitas usaha keluarga RTS, sehingga dengan pengawasan dan pembinaan tersebut pihak pelaksana program dapat memperjuangkan atau mengupayakan peningkatan volume usaha sehingga keuntungan yang didapatkan lebih besar, hal seperti ini lebih penting guna untuk melepaskan keluarga miskin dari kemiskinan permanen.

KESIMPULAN

Secara umum pandangan RTS mengenai tidak kembali terkategori sebagai sasaran pelaksanaan PNPM-MP adalah RTS

memberikan pandangan yang menunjukkan menerima posisi mereka sebagai pihak yang sudah tidak bisa menerima dana BLM, terutama bagi angsuran peminjamannya lancar yang telah meminjam hingga tiga kali periode peminjaman, namun RTS yang menunggak hanya menerima dalam satu kali periode peminjaman justru masih mengharapkan bantuan pinjaman dana bergulir dari pelaksana program PNPM-MP, tetapi ada juga yang bersifat apatis karena bantuan yang diberikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2011). Padang Dalam Angka 2011. Sumatera Barat: Badan Pusat Statistik.
Kementerian Pekerjaan Umum. (2007).

Panduan Umum PNPM Mandiri. Kementerian PU.

- Kementerian Pekerjaan Umum. (2010). Pedoman Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan. Kementerian PU.
Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta.
Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
Sukron, M. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui PNPM-Mandiri*. Universitas Sunan Kalijaga.
Yulyanti, A. A. (2010). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) di Kelurahan Cadasari Kab. Pandeglang Periode Tahun 2009*. Sultan Ageng Tirtayasa.



Penerbit :

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat
Kampus STKIP PGRI, Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat
Email : redaksimamangan@gmail.com

